

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Provinsi Riau secara geografis, geokonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. memiliki wilayah yang cukup luas dan berada di bagian tengah Pulau Sumatera. Luas wilayah keseluruhannya mencapai 87.023,66 km. Berdasarkan letak astronomis, Provinsi Riau terletak antara $02^{\circ} 25' \text{ LU}$ - $01^{\circ} 15' \text{ LS}$ dan $100^{\circ} 03' \text{ BT}$ - $104^{\circ} 00' \text{ BT}$.



Gambar 4.1
Peta Provinsi Riau

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Riau memiliki batas wilayah seperti berikut:

Utara : Sumatra Utara dan Selat Malaka

Selatan : Provinsi Jambi dan Sumatra Barat

Barat : Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara

Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Melaka

Berdasarkan data dari badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) temperature maksimum pada tahun 2017 antara 27,7^o – 28,9^o C dan temperatur minimum 26,8^o – 27,1^o C. Riau memiliki kelembaban yang relative tinggi yaitu antara 74%-84%. Dan kecepatan angin rata-rata mencapai angka 6-7 knots dan kecepatan angin maksimum mencapai 35 knots (*Riau dalam angka 2018*).

B. Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Riau pada tahun 2017 mencapai 6.657.911 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 3.416.307 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.241.604 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 105. Jumlah penduduk terbesar ada di kota Pekanbaru dan yang terkecil di kabupaten Kepulauan Meranti masing-masing sebesar 1.091.088 jiwa dan 183.297 jiwa (*Riau dalam angka 2018*).

C. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Provinsi Riau per kabupaten/kota. Dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Riau periode 2011 hingga 2017.

1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DI Kabupaten/Kota di Provinsi Riau .

Dalam mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah, salah satu yang dapat dijadikan cara untuk mewujudkannya adalah dengan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah. Nilai IPM suatu daerah akan menunjukkan seberapa besar daerah tersebut telah mencapai target pembangunan manusia. Peningkatan IPM menggambarkan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Berikut merupakan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau:

Tabel 4.1
Presentase Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau
periode tahun 2011-2017

KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (%)							Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kuantan Singingi	7.46	7.68	7.70	8.17	8.18	8.19	8.20	7.94
Indragiri Hulu	7.31	7.38	7.46	7.55	7.82	7.83	7.89	7.60
Indragiri Hilir	6.66	6.70	6.74	6.81	6.82	6.94	7.18	6.83
Pelalawan	7.20	7.41	7.74	7.82	8.17	8.18	8.19	7.81
Siak	8.72	8.77	8.81	9.05	9.20	9.21	9.40	9,02
Kampar	8.56	8.59	8.62	8.62	8.84	8.85	9.09	8.73
Rokan Hulu	7.24	7.31	7.38	7.83	7.84	7.97	8.18	6.55
Bengkalis	8.34	8.64	8.76	8.80	8.82	8.83	8.89	8.72
Rokan Hilir	7.30	7.36	7.42	7.62	7.62	7.88	7.89	7.58
Kepulauan Meranti	6.27	6.80	7.33	7.44	7.45	7.46	7.47	7.17
Pekanbaru	10.84	10.88	10.93	10.95	10.97	11.20	11.21	10.99
Dumai	9.42	9.48	9.54	9.56	9.57	9.58	9.67	9.83
Riau	68.90	69.15	69.91	70.33	70.84	71.20	71.79	70.30

Sumber: Badan Pusat Statistik, di olah

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui kabupaten/kota di provinsi Riau setiap tahunnya mengalami kenaikan IPM yang signifikan. Kabupaten/kota yang memiliki rata-rata IPM sangat tinggi di provinsi Riau dengan masing-masing rata-rata IPM kota Pekanbaru 10,99 persen, kota Dumai 9,83 persen, kabupaten Siak 9,02 persen, kabupaten Kampar 8,73 persen, dan Bengkalis 8,72 persen. Untuk kenaikan nilai rata-rata IPM tinggi adalah kabupaten Kuantan Singingi 7,94 persen, pelalawan 7,81 persen, Indragiri Hulu 7,60 persen, Rokan Hilir 7,58 persen, dan Kepulauan Meranti dengan nilai rata-rata IPM 7,17 persen, Sementara Indragiri Hilir nilai rata-rata IPM yaitu 6,83 persen. Untuk kenaikan rata-rata IPM Terendah yaitu Rokan Hulu sebesar 6,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota memiliki pencapaian IPM yang sangat baik untuk Provinsi Riau dalam kurun waktu 2011 hingga 2017.

2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu Negara atau daerah, salah satu kesuksesan yang dapat dilihat dari pencapaian IPM tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Pertumbuhan PDRB rill per kapita.’

Tabel 4.2
Pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau 2016 – 2017
(Juta Rupiah)

DAERAH	2016 (Rupiah)	2017 (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
Kuantan Singingi	20.669.051	21.583.844	4,42
Indragiri Hulu	26.741.577	27.816.420	4,01
Indragiri Hilir	39.758.402	41.627.466	4,70
Pelalawan	30.654.906	31.911.291	4,09
Siak	51.558.228	52.044.935	0,94
Kampar	47.609.043	49.042.587	3,01
Rokan Hulu	21.785.244	22.996.276	5,56
Bengkalis	80.656.528	79.230.434	-1,76
Rokan Hilir	45.605.251	46.529.651	2,02
Kepulauan Meranti	11.451.310	11.831.782	3,32
Pekanbaru	61.047.25	64.768.715	6,16
Dumai	21.401.003	22.352.640	4,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, di olah

Berdasarkan tabel 4.2, pertumbuhan angka PDRB di setiap kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2016-2017 berbeda-beda, dimana pertumbuhan PDRB tertinggi ditempati oleh Kota Pekanbaru, dan yang terendah adalah Kabupaten

Bengkalis -1,76 %. Tinggi dan rendahnya nilai PDRB di setiap kabupaten dipengaruhi oleh nilai perekonomian khususnya pendapatan di daerah tersebut.

3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Salah satu penentu pengeluaran pemerintah adalah diperuntukkan untuk tujuan pembangunan ekonomi daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penggunaannya dalam bagian atau bidang tertentu. Hal ini dapat dilakukan bersama antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Di provinsi Riau, proporsi pengeluaran pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan serta mementingkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat seperti meningkatkan pelayanan publik serta belanja anggaran dengan fungsi pendidikan masih terbilang rendah walaupun dari total APBD Provinsi Riau tetap mengalokasikan 20% dari total APBDnya.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Berikut merupakan anggaran pengeluaran pemerintah yang telah terealisasi dalam kurun waktu 2015-2017 di kabupaten/kota provinsi Riau:

Tabel 4.3
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan 2011-2017
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (juta Rupiah)

DAERAH	TAHUN						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kuansing	303.095	293.495	355.218	377.568	560.514	423.176	462.601
Indragiri Hulu	320.276	312.654	455.562	451.529	543.270	454.885	380.024
Indragiri Hilir	492.818	495.943	493.783	600.552	616.501	539.771	463.344
Pelalawan	222.730	256.938	355.141	496.164	517.570	480.467	397.118
Siak	382.725	354.961	355.141	522.425	581.186	644.517	960.549
Kampar	610.464	629.964	792.469	879.438	1.030.666	980.401	741.814
Rokan Hulu	262.181	292.218	956.801	464.878	482.634	488.782	411.749
Bengkalis	797.633	459.089	493.783	925.569	979.684	917.233	768.845
Rokan Hilir	365.134	403.462	493.783	577.428	470.878	426.140	361.999
Kep. Meranti	239.257	214.876	250.937	289.030	321.001	340.222	279.999
Pekanbaru	592.317	636.752	753.432	986.745	1.002.530	775.306	708.361
Dumai	215.016	234.915	276.209	315.474	334.468	69.387	307.949
RIAU	4803.646	4585.267	6032.259	6886.800	5407.706	6540.287	6244.352

Sumber: Badan Pusat Statistik, di olah

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Provinsi Riau tahun 2011-2017, pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga tahun 2017, akibat pendapatan pada APBD perubahan tahun 2016, yang mengalami penurunan sebesar Rp 436,1 miliar atau turun 20,46 persen sehingga berdampak pada belanja daerah untuk pendidikan yang menurun dari tahun sebelumnya.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami flukruasi dimana Total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang paling besar di Provinsi riau yaitu tahun 2014 mencapai 6886.800 miliar Rupiah.

4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

Todaro & Smith, 2003, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji (Rumate 2015).

Dalam penelitian ini menggunakan variabel pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan. Berikut merupakan anggaran pengeluaran pemerintah yang telah terealisasi dalam kurun waktu 2015-2017 di kabupaten/kota provinsi Riau:

Tabel 4.4
Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2011-2017 (juta Rupiah)

DAERAH	TAHUN						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kuansing	34.813	64.541	77.339	83.357	101.838	111.284	143.485
Indragiri Hulu	56.995	79.633,	99.976	120.787	543.270	454.885	380.024
Indragiri Hilir	82.204	102.455	130.795	180.069	616.501	539.771	463.344
Pelalawan	67.653	75.108	91.419	117.917	134.788	153.946	191.043
Siak	108.351	140.686	153.390	169.043	172.610	52.336	450.775
Kampar	129.790	125.887	131.217	172.644	231.799	225.156	741.814
Rokan Hulu	76.216	93.110	100.340	115.443	140.749	146.854	183.209
Bengkalis	167.111	217.944	259.179	306.181	308.547	18.119	304.453
Rokan Hilir	101.523	139.308	147.758	186.966	121.300	187.058	143.192
Kep. Meranti	50.470,	68.182	77.647	90.083	124.088	125.097	130.372
Pekanbaru	57.020.	69.848	92 .358	163.981	206.080	134.244	185.624
Dumai	93.858	114.000	157.816	163.716	176.968	40.687	243.768
RIAU	918.514	1211.069	1426.876	1870.187	2878.538	2189.437	3561.103

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dari tahun 2011 hingga 2017. Total Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di provinsi riau mengalami kenaikan tiap tahun, kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan total belanja 2189.437 miliar rupiah dan kembali naik ditahun 2017 dengan total belanja 3561.103 miliar rupiah.

5. perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Kemiskinan adalah masalah yang berkaitan dengan banyak aspek seperti pengangguran, pendapatan yang rendah, pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai serta lingkungan hidup yang tidak baik. Kemiskinan merupakan salah satu kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat di suatu daerah. Adanya kemiskinan dapat menimbulkan perbedaan perlakuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sehingga peran pemerintah sangat diperlukan dalam pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan pembangunan manusia. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi standar minum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan dan non makanan.

Berikut merupakan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu 2011-2017 di kabupaten/kota provinsi Riau.

DAERAH	TAHUN							Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kuansing	31.07	31.26	34.71	33.52	34.10	31.22	31.95	32.54
Indragiri Hulu	27.51	27.68	29.60	29.40	31.63	29.73	29.42	29.28
Indragiri Hilir	52.82	53.01	54.18	52.39	56.85	56.82	55.40	54.49
Pelalawan	37.59	38.28	43.55	42.67	47.53	45.35	44.40	42.76
Siak	20.83	21.04	23.21	22.54	24.81	24.86	26.83	23.44
Kampar	61.20	61.75	68.58	67.61	72.22	67.68	66.33	66.48
Rokan Hulu	52.82	53.55	59.85	58.29	64.74	67.42	69.24	60.84
Bengkalis	34.96	35.25	40.11	38.82	40	37.49	38.19	35.26
Rokan Hilir	43.77	44.02	47.47	46.07	49.13	52.40	53.19	48.00
Kep. Meranti	63.58	63.85	64.02	61.07	61.64	56.18	53.05	60.48
Pekanbaru	32.34	32.66	32.46	32.29	33.76	32.49	33.09	32.72
Dumai	13.97	14.11	13.72	13.62	14.97	13.76	13.53	13.95
Riau	472.45	476.46	511.47	498.28	531.39	515.40	514.62	502.86

Tabel 4.5 di atas menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin per kabupaten di Provinsi Riau. Untuk skala Provinsi, perkembangan jumlah penduduk miskin berfluktuasi setiap tahunnya (2011-2017) . sedangkan rata-rata jumlah penduduk miskin provinsi riau mencapai 502.86 ribu jiwa. Jumlah tersebut diperoleh dari jumlah rata-rata penduduk miskin per kabupaten. Daerah atau kabupaten yang memiliki sumbangan paling besar terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi riau adalah kabupaten Kampar, Rokan hulu dan kepulauan

meranti dengan rata-rata penduduk miskin sebesar 66,48 ribu jiwa, 60,84 ribu jiwa dan 60,48. dari 12 kabupaten/kota, kabupaten tersebut memiliki penduduk miskin lebih dari 1.000 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di provinsi Riau.

Sedangkan daerah yang memiliki sumbangan terkecil terhadap penduduk miskin di provinsi Riau adalah Kota Dumai dengan rata-rata penduduk miskin 13,95 ribu jiwa dan kabupaten Siak dengan rata-rata penduduk miskin 23,44 ribu jiwa. Dengan menurunnya jumlah penduduk miskin setiap tahunnya per kabupaten/kota maka dapat dilihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusianya.